



Keterpaduan Infrastruktur Terpadu Antar Sektor Untuk Mendukung Pengembangan Wilayah Kabupaten Pringsewu

Hari Purmawan¹ Ika Kustiani² Sarkowi³

¹ Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Jl. ZA Pagar Alam KM 11 Rajabasa, Bandarlampung, 35145

² Program Studi Program Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandarlampung 35145

³ Program Studi Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandarlampung 35145

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima : 11 Februari 2024

Direvisi : 15 April 2024

Diterbitkan : 2 Juni 2024

Kata kunci:

Infrastruktur Terpadu Wilayah
Pringsewu

Pembangunan akan terkait dengan hampir semua dimensi kehidupan masyarakat. Karena itu, pembangunan harus dapat menjadikan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai sasaran yang harus dicapai. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah pengembangan wilayah yang dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar-kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu strategi pembangunan yang digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan antar-wilayah adalah strategi keterkaitan (*linkages*) antar-wilayah. Pembangunan infrastruktur diarahkan juga untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah.

I. PENDAHULUAN

Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan. Pengembangan wilayah tidak selalu menimbulkan akibat positif, akan tetapi dapat juga menimbulkan akibat negatif, salah satunya adalah terjadinya ketimpangan pembangunan antar-wilayah. Ketimpangan pembangunan antar-wilayah merupakan masalah umum yang melanda banyak negara. Ketimpangan ini terjadi akibat adanya pembagian ekonomi yang tidak merata, yang pada akhirnya juga dapat melahirkan masalah-masalah sosial politik (Rustiadi dkk, 2009).

Salah satu strategi pembangunan yang digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan antar-wilayah adalah strategi keterkaitan (*linkages*) antar-wilayah. Strategi ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik

antar-wilayah melalui pembangunan berbagai infrastruktur fisik seperti jaringan, transportasi jalan, pelabuhan, jaringan komunikasi dan lain-lain. Keterkaitan atau keterpaduan pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari konsep pengembangan wilayah itu sendiri. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar-wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur diarahkan juga untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan

mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan Teknis dan Metodologi

Analisis spasial memiliki dua perspektif pemahaman, yaitu perspektif geografi dan perspektif sosial-ekonomi. Dalam perspektif geografi, data bersifat kaku dan menyangkut lokasi atau tempat yang sangat jelas dan terukur, tanpa harus memahami permasalahan sosial-ekonomi yang ada di dalamnya. Analisis spasial lebih terfokus pada kegiatan investigasi pola-pola dan berbagai atribut atau gambaran dalam studi kewilayahan dengan menggunakan permodelan untuk tujuan meningkatkan pemahaman dan prediksi/peramalan (Haining, 1995). Dalam perspektif sosial-ekonomi, analisis spasial lebih menekankan tentang “apa yang menjadi masalah” (what) dan “mengapa masalah itu terjadi” (why). Karena lebih menekankan pada pemahaman terhadap penyebab permasalahan, konteks spasial lebih sering menggunakan istilah spasial yang dikaitkan dengan ruang hidup manusia, seperti desa, kota, wilayah, pusat, hinterland dan lain-lain.

Adapun dari sisi perumusan rekomendasi kebijakan pengembangan wilayah, kajian ini menggunakan pendekatan demand side strategy dan supply side strategy. Demand side strategy adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui peningkatan barang-barang dan jasa-jasa dari masyarakat setempat melalui kegiatan produksi lokal. Sehingga dapat dikatakan bahwa strategi ini berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat di suatu wilayah. Konsekwensi dari strategi ini adalah membutuhkan waktu yang lama karena berhubungan dengan transformasi teknologi, transformasi struktur kelembagaan dan lamanya evolusi/perombakan cara berpikir. Namun sekalipun demikian, strategi ini memiliki keunggulan yaitu umumnya berjalan stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan di luar wilayah. Stabilitas ini berkaitan dengan perubahan-perubahan struktur kelembagaan yang mantap (Rustiadi dkk, 2009).

Pendekatan supply side strategy merupakan suatu strategi pengembangan wilayah yang terutama diupayakan melalui investasi modal untuk kegiatan-kegiatan produksi yang berorientasi keluar. tujuan dari penggunaan strategi ini adalah untuk meningkatkan pasokan dari komoditi yang pada umumnya diproses dari sumberdaya alam lokal. Keunggulan strategi ini adalah prosesnya relatif cepat sehingga efek yang ditimbulkannya juga cepat terlihat. Namun juga ada beberapa permasalahan yang dapat timbul, diantaranya keterbatasan kapasitas (pengetahuan, keahlian, kompetensi) penduduk lokal, sehingga hanya segmen masyarakat tertentu saja yang menikmatinya dan juga strategi ini sangat peka terhadap perubahan-perubahan ekonomi yang berasal dari luar wilayah (Rustiadi dkk, 2009).

2.2 Kegiatan analisis

Analisis Dokumen Perencanaan

Keluaran dari analisis dokumen perencanaan adalah telaah atas kebijakan, rencana dan program pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur.

Analisis Spasial

Keluaran dari analisis spasial adalah profil potensi pengembangan wilayah berdasarkan dukungan infrastruktur eksisting.

Analisis Skalogram

Keluaran dari analisis skalogram adalah tingkat perkembangan wilayah seluruh kecamatan.

Dari analisis spasial dan skalogram akan dapat dihasilkan identifikasi potensi dampak pengembangan infrastruktur terhadap pengembangan wilayah.

Selanjutnya, ketiga analisis di atas lalu dikombinasikan dengan kondisi obyektif melalui kunjungan ke lapangan, diperlukan sebagai bahan untuk melakukan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Setelah dilakukan analisis deskriptif kuantitatif, maka akan diperoleh hasil akhir dari kajian ini yaitu strategi pengembangan keterpaduan infrastruktur jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Pringsewu.

2.3 Survey Lapangan dan Inventarisasi Data

Dari hasil kunjungan lapangan, didapati bahwa ketersediaan infrastruktur eksisting masih belum maksimal untuk mendukung pengembangan kawasan strategis agropolitan dan minapolitan. Di bidang jalan, infrastruktur jalan yang ada masih terus ditingkatkan kualitasnya agar dapat mendukung pusat-pusat kegiatan dalam kawasan, termasuk mendukung pengembangan kawasan strategis agropolitan dan minapolitan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Inventarisasi Data

Berdasarkan tinjauan lapangan, ditemukan bahwa infrastruktur dasar di bidang jalan, sumber daya air, perumahan dan pemukiman masih belum menunjukkan keterpaduan. Hanya 2 kecamatan yaitu Pringsewu dan Banyumas yang memiliki sebaran infrastruktur dasar yang berkualitas, sedangkan 7 kecamatan lainnya masih memerlukan berbagai penyediaan infrastruktur dasar tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih ada ketimpangan pembangunan infrastruktur di kecamatan-kecamatan yang ada di Pringsewu sehingga keterpaduan infrastruktur belum optimal dalam mendukung pengembangan wilayah di kecamatan-kecamatan tersebut. Selanjutnya untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk, penetapan kawasan permukiman skala perkotaan dan skala perdesaan harus juga menjadi perhatian. Berdasarkan analisis skalogram, hanya Kecamatan Pringsewu dan

Banyumas yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi dan relatif lebih siap dalam mendukung kawasan permukiman. Sedangkan kecamatan lainnya masih memerlukan pembangunan berbagai infrastruktur dasar dalam menunjang kawasan permukiman seperti sistem transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, drainase, sistem limbah dan persampahan.

Bila dikaitkan dengan penetapan kawasan strategis, yaitu Kawasan Strategis Agropolitan yang ada di Kecamatan Gadingrejo, Sukoharjo dan Adiluwih dan Kawasan Strategis Minapolitan di Kecamatan Pagelaran, kecamatan-kecamatan tersebut kecuali Kecamatan Gadingrejo, masuk ke dalam tingkat perkembangan wilayah rendah dimana masih diperlukan pembangunan infrastruktur dasar antar-sektor dalam menunjang kawasan strategis, seperti infrastruktur di bidang jalan dan sumber daya air. Selain itu berdasarkan kunjungan ke lapangan, Kawasan Strategis Minapolitan di Kecamatan Pagelaran masih memerlukan berbagai infrastruktur pendukung lainnya, seperti jalan desa, ruang pendingin (*cold room*) dan Tempat Pelelangan Ikan.

Hipotesis yang dapat ditarik dari ketiga analisis di atas adalah bahwa potensi ekonomi terbesar Kabupaten Pringsewu adalah di sektor pertanian dan perikanan. Potensi ini didukung dengan jenis tanah, kondisi iklim, ketinggian, kelerengan, DAS dan CAT, serta tutupan lahan eksisting. Potensi pertanian dan perikanan ini mengharuskan adanya penyediaan infrastruktur pendukung. Sementara itu, ditinjau dari tingkat perkembangan wilayah kecamatan, hanya ada 2 kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang masuk ke hirarki 1 (tingkat perkembangan tinggi) yaitu Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Banyumas. Ini bermakna bahwa kondisi infrastruktur pada 2 kecamatan tersebut sudah cukup baik dalam menunjang aktivitas masyarakat sesuai dengan penetapan pusat-pusat kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan. 1 kecamatan yaitu Kecamatan Gadingrejo masuk kategori tingkat perkembangan wilayah hirarki 2 (tingkat perkembangan wilayah sedang). Sedangkan 6 dari 9 kecamatan di Kabupaten Pringsewu tingkat perkembangan wilayah masih tergolong rendah. Hal ini bermakna fasilitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan aksesibilitas kecamatan pada hirarki ini masih belum memadai. Oleh karena itu, kebutuhan yang lebih utama saat ini adalah penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas pada tiap kecamatan secara lebih merata. Sehingga potensi pengembangan wilayah di semua kecamatan bisa berkembang lebih maju akibat lebih meratanya sebaran infrastruktur dasar yang berkualitas.

Data hasil survey identifikasi ditunjukkan pada tabel 1

Rencana Struktur Ruang dan Kawasan Strategis	Nama Kecamatan	Tk Perkem Wil	Kebutuhan Infrastruktur
Kawasan Permukiman Perkotaan	Pringsewu	1	Sistem transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi,
	Gadingrejo	2	
	Ambarawa	3	
	Sukoharjo	3	

	Adiluwih	3	drainase, sistem limbah, persampahan
	Pagelaran	3	
Kawasan Permukiman Perdesaan	Banyumas	1	Sistem transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, drainase, sistem limbah, persampahan
	Pagelaran Utara	3	
	Pardasuka	3	
Kawasan Strategis Agropolitan	Gadingrejo	2	Jalan usaha tani (<i>farm road</i>), sarana irigasi, energi (listrik), gudang sarana produksi, terminal agribisnis, pasar
	Sukoharjo	3	
	Adiluwih	3	
Kawasan Strategis Minapolitan	Pagelaran	3	Jalan desa, sarana irigasi, energi (listrik), dermaga, sarana industri pengolahan, ruang pendingin (<i>cold room</i>), Tempat Pelelangan Ikan

IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis deskriptif kuantitatif, maka diperoleh hasil akhir dari kajian ini yaitu strategi pengembangan keterpaduan infrastruktur jangka menengah dan jangka panjang dalam mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

Strategi Jangka Menengah

- 1) Penyediaan infrastruktur dasar yang meliputi infrastruktur sistem transportasi, sumber daya air, energi, telekomunikasi, drainase, sistem limbah dan persampahan penting dalam rangka mendukung pusat-pusat kegiatan dalam kawasan.
- 2) Perlu dilaksanakannya penyediaan infrastruktur antar sektor secara terpadu dalam rangka peningkatan dan pengembangan Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan agar terwujud suatu ekosistem pertanian dan perikanan yang memiliki produktivitas yang optimal sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pringsewu.

Strategi Jangka Panjang

- 1) Optimalisasi Kawasan Strategis Agropolitan dan Minapolitan melalui penyediaan teknologi pasca-panen dan dukungan infrastruktur berbasis information and communication technology (ICT) agar dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan serta memperluas jejaring dan cakupan pemasaran terhadap hasil produksi pertanian dan perikanan.
- 2) Penyiapan kawasan permukiman baru yang berbasis hunian vertikal untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk, potensi pertumbuhan ekonomi di Kawasan

Strategis Agropolitan dan Minapolitan serta menjaga keberlangsungan lahan pertanian dan perikanan eksisting.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ananda, A. R., Nama, G. F., & Mardiana, M. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Geografis Pemerintahan Kota Metro Dengan Metode SSADM (Structured System Analysis and Design Method). *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).

Fitriani, M., Nama, G. F., & Mardiana, M. (2022). Implementasi Association Rule Dengan Algoritma Apriori Pada Data Peminjaman Buku UPT Perpustakaan Universitas Lampung Menggunakan Metodologi CRISP-DM. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).

Hasan, Y. A., Mardiana, M., & Nama, G. F. (2022). Sistem Pendeteksi Kebocoran Tabung Gas LPG Otomatis Berbasis Arduino Uno Menggunakan Metode Prototype. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(3).

Hariany, S., Despa, D., & Nama, G. F. (2021). Analisis Debit Andalan Das Way Andeng Menggunakan Data Satelit TRMM. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 9(3).

Putri, D. D., Nama, G. F., & Sulistiono, W. E. (2022). Analisis Sentimen Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada Twitter Menggunakan Metode Naive Bayes Classifier. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 10(1).

WP, P. N. S., Nama, G. F., & Komarudin, M. (2022). Sistem Pengendalian Kadar PH dan Penyiraman Tanaman

Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur, Kementerian PUPR. 2017. Buku Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek Tahun 2018 – 2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR. Jakarta. Kementerian PUPR.

Rustiadi, dkk. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.